



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2429-2435

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pendapatan Nasional Sebagai Indikator Utama Dalam Perumusan Ekonomi Publik

Dara Bella¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
darabella3737@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak

Pendapatan nasional berfungsi sebagai indikator kunci dalam merancang kebijakan ekonomi publik karena membantu memantau kondisi ekonomi suatu negara. Melalui data pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah dapat mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, kemajuan produksi nasional, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pendapatan nasional berfungsi sebagai dasar utama untuk merumuskan kebijakan fiskal, seperti anggaran negara (APBN), perpajakan, subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan nasional, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini selaras dengan realitas ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi digital juga memengaruhi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. E-commerce dan transaksi digital mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang bisnis baru, khususnya bagi UMKM. Namun, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan dalam menggunakan pendapatan nasional sebagai dasar kebijakan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, sektor informal yang sulit diukur, pembangunan yang tidak merata, inflasi, dan keterbatasan indikator ini dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut data tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kemajuan positif, dengan peningkatan PDB dan aktivitas ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi publik, pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran pemerintah telah terbukti berkontribusi pada pertumbuhan ini. Namun, peningkatan pendapatan nasional tidak sepenuhnya menjamin distribusi kemakmuran yang adil, karena kesenjangan ekonomi masih terlihat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi publik yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesetaraan pendapatan dan peningkatan kemakmuran..

Kata kunci: Pendapatan Nasional, Ekonomi Publik, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.

1. Latar Belakang

Pendapatan nasional merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara karena mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Data pendapatan nasional sering digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi publik, seperti kebijakan fiskal, pembangunan nasional, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui indikator ini, pemerintah dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pendapatan nasional memainkan peran strategis dalam proses perumusan kebijakan ekonomi publik yang menekankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat [1].

Dalam dinamika ekonomi modern, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kebijakan yang efektif yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan nasional merupakan instrumen kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi karena memberikan gambaran tentang tingkat produksi, konsumsi, investasi, dan pendapatan publik. Penelitian oleh [2] mengungkapkan bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi negara. Hal ini menunjukkan bahwa analisis pendapatan nasional sangat penting untuk mendukung pengembangan kebijakan ekonomi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pengukuran pendapatan nasional melibatkan lebih dari satu metode; dapat dihitung menggunakan tiga metode utama: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi suatu negara. Pendekatan produksi memeriksa nilai tambah dari semua sektor ekonomi, pendekatan pendapatan menghitung total pendapatan faktor produksi, sedangkan pendekatan pengeluaran mempertimbangkan total pengeluaran dalam perekonomian. Pendapatan nasional juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi,

khususnya dalam perencanaan kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk menentukan arah pengeluaran negara, kebijakan pajak, dan strategi pembiayaan pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengendalikan siklus ekonomi untuk menghindari ketidakseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pendapatan nasional juga merupakan alat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok sosial. Data ini membantu pemerintah mengidentifikasi distribusi pendapatan yang tidak merata dan dengan demikian merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator pertumbuhan tetapi juga sebagai dasar untuk menganalisis keadilan ekonomi. Namun, pengukuran pendapatan nasional menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam memastikan keakuratan data yang dihasilkan. Sektor informal yang besar di beberapa negara, termasuk Indonesia, seringkali tidak tercatat secara lengkap dalam perhitungan resmi. Lebih lanjut, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan kesulitan dalam mengukur aktivitas ekonomi non-tradisional.

Selain berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi, pendapatan nasional juga terkait erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pemerintah dapat memanfaatkan data pendapatan nasional untuk menetapkan prioritas pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi nasional berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pembangunan daerah [3]. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memperluas layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, perkembangan globalisasi ekonomi dan digitalisasi juga berdampak pada struktur pendapatan nasional suatu negara. Perubahan pola konsumsi, produksi, dan investasi mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi publik dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurut penelitian Akbar Lutfi dan Arief Bimo Sriyudhanto (2024) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru seperti ketidaksetaraan ekonomi dan persaingan bisnis yang semakin ketat [4]. Oleh karena itu, pendapatan nasional memerlukan analisis mendalam agar kebijakan ekonomi publik yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi digital sektor ekonomi telah melahirkan industri-industri baru yang sebelumnya kurang menonjol dalam perhitungan pendapatan nasional, seperti ekonomi kreatif, perdagangan online, dan layanan berbasis platform digital. Perkembangan ini telah membuat struktur ekonomi lebih dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pengukuran yang lebih fleksibel untuk memastikan bahwa pendapatan nasional benar-benar mencerminkan realitas ekonomi secara akurat. Oleh karena itu, pemerintah wajib secara berkala memperbarui sistem statistik ekonominya untuk beradaptasi dengan aktivitas ekonomi modern yang semakin bergantung pada teknologi. Lebih lanjut, kemajuan ini juga menuntut kebijakan ekonomi publik yang lebih responsif dan inklusif. Pemerintah tidak hanya harus mengejar peningkatan angka pendapatan nasional, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat. Dengan demikian, pendapatan nasional bukan hanya tolok ukur makroekonomi, tetapi juga landasan untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi telah berhasil mencapai kesetaraan dan meminimalkan kesenjangan sosial di era perubahan struktur ekonomi global.

Meskipun banyak penelitian tentang pendapatan nasional telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Sebuah studi oleh Arintoko (2022) mengungkapkan bahwa kebijakan moneter berdampak pada inflasi, output, dan nilai tukar, yang merupakan faktor penting. Berdasarkan uraian ini, penelitian ini dilakukan untuk menguji peran pendapatan nasional sebagai indikator kunci dalam perumusan kebijakan ekonomi publik [5]. Penelitian ini relevan karena pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang pendapatan nasional merupakan elemen kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sambil mengatasi tantangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara pendapatan nasional dan perumusan kebijakan ekonomi publik. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan nasional sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, untuk mewujudkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif berbasis deskriptif. Strategi ini melibatkan pengumpulan berbagai referensi akademis tentang pendapatan negara dan keuangan publik, seperti publikasi jurnal, literatur ilmiah, dan studi terkait sebelumnya. Pemilihan studi literatur dimaksudkan untuk memberikan wawasan mendalam tentang esensi, peran, dan pemanfaatan pendapatan negara sebagai tolok ukur utama dalam mengembangkan strategi kebijakan fiskal publik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyempurnakan kerangka kerja teoretis, temuan penelitian, dan perspektif ahli tentang hubungan antara pendapatan negara dan regulasi pemerintah di bidang ekonomi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan peninjauan jurnal akademis daring yang selaras dengan tema diskusi. Informasi yang diperoleh kemudian diproses melalui analisis konten, yang melibatkan peninjauan, perbandingan, dan interpretasi materi dari berbagai sumber untuk membentuk sintesis yang koheren. Analisis tersebut berfokus pada peran pendapatan negara sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal publik, termasuk hubungannya dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan publik. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran komprehensif tentang pentingnya pendapatan negara dalam merancang kebijakan fiskal publik. silakan tulis dalam bentuk pseudocode atau algoritma atau diagram alir.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pendapatan Nasional Sebagai Indikator Ekonomi Negara

Pendapatan nasional merupakan indikator kunci untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri selama periode tertentu. Data ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur tingkat produksi, pendapatan publik, dan kemajuan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendapatan nasional berfungsi sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. Lebih lanjut, data ini berfungsi sebagai dasar penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi publik guna memastikan pembangunan yang optimal dan terfokus. Pendapatan nasional terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan pendapatan nasional menunjukkan lonjakan produksi barang dan jasa, tanda dari ekonomi yang berkembang pesat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir meskipun menghadapi gejolak global. Oleh karena itu, indikator ini sangat berguna untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara dan kapasitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya [6].

Pendapatan nasional juga membantu menganalisis kondisi ekonomi suatu masyarakat secara mendalam. Nilai yang tinggi biasanya mencerminkan lebih banyak lapangan kerja, pendapatan per kapita yang lebih tinggi, dan peningkatan aktivitas di berbagai sektor. Sebaliknya, penurunan pendapatan nasional seringkali menandakan perlambatan ekonomi, yang dapat memicu pengangguran massal dan melemahkan daya beli. Oleh karena itu, pemerintah perlu memantau faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kemakmuran yang merata. Pendapatan nasional bukan hanya ukuran kondisi ekonomi, tetapi juga terkait langsung dengan kebijakan fiskal pemerintah. Data ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan anggaran negara, pajak, subsidi, dan program pembangunan. Penelitian oleh Wijayanti dan Aji (2023) menyatakan bahwa kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengeluaran pemerintah dan investasi sektoral [7]. Lebih lanjut, kemajuan teknologi dan manajemen data mendukung keputusan-keputusan ini. Febrian dan Figueredo (2024) menyoroti bagaimana kecerdasan buatan dalam menganalisis data keuangan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi publik [8].

Pada tingkat yang lebih luas, pendapatan nasional bukan hanya statistik, tetapi juga fondasi untuk menentukan strategi pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan indikator yang akurat untuk memastikan kebijakan selaras dengan realitas sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Riofita (2024), yang menekankan peran indikator dan strategi yang tepat dalam memajukan ekonomi digital dan memastikan keberhasilan sistem ekonomi [9]. Riofita (2023) juga menambahkan bahwa kebijakan yang relevan dengan kebutuhan publik akan meningkatkan pencapaian tujuan sistemik [10]. Dengan demikian, pendapatan nasional merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi publik, karena memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi negara dan menjadi dasar kebijakan pemerintah.

3.2. Peran Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan ekonomi publik karena berfungsi sebagai dasar utama perencanaan fiskal pemerintah. Dengan data ini, pemerintah dapat menganalisis kondisi ekonomi negara, memastikan bahwa kebijakan lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan rakyat. Ketika pendapatan

nasional meningkat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, pemerintah menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara [11].

Pendapatan nasional juga membentuk perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan pajak, subsidi, dan bantuan sosial. Pemerintah menggunakan data ini untuk memprediksi pendapatan negara dan menentukan alokasi anggaran untuk masyarakat. Selama kondisi ekonomi yang baik, anggaran pembangunan dan bantuan sosial dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, ketika ekonomi melemah, pemerintah menerapkan penghematan fiskal dan penyesuaian untuk menjaga stabilitas. Ramdani (2024) menyatakan bahwa subsidi dan bantuan sosial berdampak pada pendapatan publik, menjadikan kebijakan-kebijakan ini sebagai elemen kunci dalam perekonomian [12].

Lebih lanjut, pendapatan nasional terkait erat dengan pembangunan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi biasanya menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, lebih banyak lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola perekonomian secara efektif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat investasi, konsumsi publik, dan mengembangkan sektor-sektor strategis. Di sini, pemerintah bertindak sebagai pengelola utama ekonomi publik, berkewajiban untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran yang merata [13].

Dalam praktiknya, pemerintah sering menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berdasarkan kondisi nasional, sebagaimana tercermin dalam data pendapatan nasional, seperti subsidi energi, bantuan sosial untuk kaum miskin, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data ekonomi juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Teknologi berbasis AI dalam mengelola data keuangan pemerintah membuat keputusan ekonomi publik lebih tepat dan efisien [8]. Hal ini sejalan dengan temuan Riofita (2024), yang menunjukkan bahwa strategi manajemen yang baik meningkatkan efektivitas layanan dan pencapaian tujuan ekonomi [14].

3.3. Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan nasional sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama karena memengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk, sehingga semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula pendapatan rata-rata per orang. Hal ini mencerminkan kapasitas ekonomi masyarakat yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan nasional merupakan indikator kunci untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional seringkali dianggap sebagai sinyal peningkatan kesejahteraan umum [15].

Selain itu, pendapatan nasional juga memengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Ketika pendapatan nasional meningkat, produksi barang dan jasa biasanya meningkat, yang meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, penurunan pendapatan nasional seringkali melemahkan aktivitas ekonomi dan mengurangi peluang kerja. Penelitian oleh Harefa dkk. (2025) menegaskan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat merusak kesejahteraan karena membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar [16].

Pendapatan nasional juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Peningkatan ini memberi pemerintah ruang untuk memperluas pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial, dan layanan publik. Hal ini akan meningkatkan kesempatan kerja dan secara bertahap mengurangi kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional Indonesia cukup stabil akhir-akhir ini, yang telah mendorong aktivitas ekonomi. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata jika distribusi pendapatan tetap tidak merata [6].

Pada kenyataannya, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu secara langsung mendorong kemakmuran secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti pendapatan rendah, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi antar daerah seringkali menghambat hal ini. Aslamiyah (2024) menjelaskan bahwa kemakmuran tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan nasional, tetapi juga pada kesetaraan ekonomi, keadilan sosial, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pertumbuhan pendapatan nasional yang merata melalui kebijakan ekonomi yang tepat, pembangunan yang merata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia [17].

3.4. Dampak Ekonomi Digital terhadap Pendapatan Nasional dan Ekonomi Publik

Ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan internet, penetrasi smartphone, dan peningkatan penggunaan platform digital telah memunculkan berbagai aktivitas ekonomi online. Marketplace, pembayaran digital, dan transaksi online kini telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini berdampak positif pada peningkatan perdagangan dan konsumsi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi digital mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui peningkatan bisnis, transaksi online, dan efisiensi di berbagai sektor [13].

Perkembangan marketplace dan transaksi digital juga berdampak pada pendapatan negara dan ekonomi publik. Transaksi jual beli online mempermudah akses publik, sehingga meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi. Ekonomi digital juga membuka peluang bisnis baru, terutama bagi UMKM yang dapat memasarkan produk mereka lebih luas melalui platform online. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, pendapatan negara dari pajak dan sektor terkait berpotensi meningkat. Oleh karena itu, ekonomi digital merupakan pendorong utama peningkatan pendapatan nasional dan penguatan ekonomi negara.

Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan ekonomi dan pajak untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi digital. Tantangan utama terletak pada kesiapan pemerintah untuk mengatur perpajakan aktivitas ekonomi online. Lebih lanjut, pemerintah perlu menjamin keamanan data, perlindungan konsumen, dan persaingan bisnis yang adil dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat untuk memastikan ekonomi digital memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Tantangan Pemerintah dalam Memanfaatkan Pendapatan Nasional sebagai Dasar Kebijakan

Pendapatan nasional berfungsi sebagai indikator kunci bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi publik. Data ini membantu memahami kondisi ekonomi negara, tingkat produksi, dan dinamika pertumbuhan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan pendapatan nasional sebagai dasar kebijakan masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama adalah ketidaksetaraan ekonomi, di mana manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata di seluruh masyarakat. Pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin kemakmuran yang adil bagi semua. Ketidaksetaraan ekonomi merupakan isu sentral dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu disertai dengan kesetaraan pendapatan. Akibatnya, kelompok-kelompok tertentu menikmati manfaat yang lebih besar daripada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional tidak selalu mengatasi ketidakseimbangan jika distribusi pendapatan tetap tidak merata [6].

Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan yang adil sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang luas pada semua lapisan masyarakat. Selain itu, sektor informal menghambat keakuratan pengukuran pendapatan nasional. Banyak kegiatan ekonomi, khususnya usaha kecil dan pekerjaan informal, tidak tercatat dengan benar dalam data resmi. Akibatnya, data pendapatan nasional seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Padahal, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja bagi kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan sistem pengumpulan datanya untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan bermanfaat bagi kebijakan publik. Tantangan selanjutnya adalah distribusi pembangunan yang tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus pembangunan di wilayah tertentu menciptakan kesenjangan kesejahteraan antar provinsi. Perbedaan infrastruktur, layanan sosial, dan kinerja ekonomi provinsi memicu ketidaksetaraan pendapatan. Wilayah dengan fasilitas yang lebih baik cenderung tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang kurang berkembang. Situasi ini menekankan perlunya pembangunan yang adil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang seimbang di seluruh Indonesia. Inflasi dan ketidakstabilan ekonomi juga mempersulit penggunaan pendapatan nasional sebagai acuan kebijakan. Peningkatan pendapatan nasional dapat terkikis oleh inflasi yang tinggi, yang menekan daya beli dan kesejahteraan masyarakat [18].

Inflasi mengganggu perekonomian nasional melalui kenaikan harga barang, penurunan konsumsi, dan ketidakstabilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk menjaga stabilitas sehingga pertumbuhan pendapatan nasional benar-benar meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pendapatan nasional memiliki keterbatasan sebagai ukuran kesejahteraan. Indikator ini hanya mencakup total pendapatan dan produksi suatu negara, tanpa mencerminkan kesetaraan, kualitas hidup, pendidikan, atau aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, angka pendapatan nasional yang tinggi tidak secara otomatis berarti kesejahteraan sosial yang optimal. Pemerintah harus melengkapi hal ini dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan koefisien Gini untuk memastikan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan holistik [19].

3.6. Analisis Data Pendapatan Nasional Indonesia untuk Kebijakan Ekonomi

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61 persen year-on-year, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga saat ini sebesar Rp 6.187,2 triliun. Angka ini lebih tinggi dari periode sebelumnya, mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi nasional. Dari segi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling cepat sebesar 21,81 persen, diikuti oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen. Hal ini menunjukkan pengaruh signifikan kebijakan pemerintah terhadap ekspansi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat terkait erat dengan kebijakan fiskal pemerintah, seperti peningkatan pengeluaran negara, bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan. Data BPS menegaskan bahwa konsumsi pemerintah akan menjadi penggerak utama pada tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan data pendapatan nasional dan PDB sebagai acuan utama untuk merancang kebijakan ekonomi guna mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Pertumbuhan PDB juga mencerminkan peningkatan produksi dan konsumsi swasta. Di tingkat sektor bisnis, sektor akomodasi dan makanan dan minuman menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan 13,14 persen, didorong oleh mobilitas publik, konsumsi, dan program pemerintah pasca-pandemi. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan publik secara langsung memengaruhi kemajuan sektor bisnis dan aktivitas ekonomi secara lebih luas. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh masyarakat. Sebagian mengalami penurunan daya beli dan kesenjangan regional. Diskusi di forum ekonomi digital mengungkapkan bahwa manfaat pertumbuhan lebih dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara kelas menengah ke bawah berjuang dengan penurunan omset bisnis dan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional tidak secara otomatis berarti peningkatan kemakmuran.

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, pertumbuhan pada tahun 2026 lebih baik: 5,11 persen sepanjang tahun 2025, meningkat menjadi 5,39 persen pada kuartal keempat tahun 2025, dan kemudian 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026. Tren ini merupakan hasil dari kebijakan yang mendorong konsumsi publik, pengeluaran negara, dan pembangunan. Secara keseluruhan, data pendapatan nasional dan PDB berfungsi sebagai landasan penting bagi kebijakan ekonomi publik. Pemerintah menggunakan data ini untuk mengarahkan kebijakan fiskal, pembangunan, subsidi, dan bantuan sosial demi stabilitas. Data juga membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan terhadap masyarakat. Interpretasi data ekonomi sangat penting agar kebijakan tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga secara adil meningkatkan kesejahteraan publik [6].

4. Kesimpulan

Pendapatan nasional berfungsi sebagai indikator kunci dalam merancang kebijakan ekonomi publik karena membantu memantau kondisi ekonomi suatu negara. Melalui data pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah dapat mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, kemajuan produksi nasional, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pendapatan nasional berfungsi sebagai dasar utama untuk merumuskan kebijakan fiskal, seperti anggaran negara (APBN), perpajakan, subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan nasional, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini selaras dengan realitas ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi digital juga memengaruhi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. E-commerce dan transaksi digital mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang bisnis baru, khususnya bagi UMKM. Namun, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan dalam menggunakan pendapatan nasional sebagai dasar kebijakan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, sektor informal yang sulit diukur, pembangunan yang tidak merata, inflasi, dan keterbatasan indikator ini dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut data tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami kemajuan positif, dengan peningkatan PDB dan aktivitas ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi publik, pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran pemerintah telah terbukti berkontribusi pada pertumbuhan ini. Namun, peningkatan pendapatan nasional tidak sepenuhnya menjamin distribusi kemakmuran yang adil, karena kesenjangan ekonomi masih terlihat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi publik yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesetaraan pendapatan dan peningkatan kemakmuran.

Referensi

- [1] A. Gunawan and H. Riofita, "Peran Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Publik: Konsep, Manfaat, dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah," *J. Pendidik. Tambusa*, vol. 9, pp. 17860–17863, 2025. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28769>
- [2] M. I. Fadilla and Nurhayati, "Determinan Pendapatan Nasional dan Rekomendasi Kebijakan Rata-rata," *J. Din. Ekon. dan Bisnis*, vol. 21, no. 2, pp. 209–228, 2024. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB>
- [3] A. D. Wahyuningtias, H. Sasana, and R. R. Sugiharti, "DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 3 Nomor 1," *Din. Dir. J. Econ.*, vol. 3, 2022. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic>

- [4] A. Pengaruh, E. Digital, and T. Pertumbuhan, "Jurnal of Policy," *J. Policy*, vol. 15, no. 2, pp. 100–106, 2024, [Online]. Available: <https://journal.uns.ac.id/policy%0AJurnal>
- [5] Arintoko, "MONETARY POLICY SHOCK ON INFLATION , OUTPUT ," *Trikonomika*, vol. 21, no. 1, pp. 8–15, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.23969/trikononika.v21i1.3990>
- [6] A. U. Hermawan and A. R. Y. Taher, "E-journal Field of Economics , Business , and Entrepreneurship," vol. 3, 2025, [10.23960/efebe.v3i3.263](https://doi.org/10.23960/efebe.v3i3.263).
- [7] M. Ramadhan, B. Aji, and D. Wijayanti, "Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *J. Apl. Bisnis*, pp. 379–389, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art7>
- [8] G. F. Febrian and G. Figueredo, "K EMENKEU GPT : L EVERAGING A L ARGE L ANGUAGE M ODEL ON I NDONESIA ' S G OVERNMENT F INANCIAL D ATA AND R EGULATIONS TO E NHANCE D ECISION M AKING," 2024. Available: <https://share.google/xoJ3CRxsXt211o3Vu>
- [9] H. Riofita, "Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness," *J. Islam. Econ. Bus. Res.*, vol. 4, no. 2, pp. 234–247, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.282>
- [10] H. Riofita, "Memicu Kesiediaan Mahasiswa Merekomendasikan Jurusan Pendidikan Ekonomi," *EKLETIK J. Pendidik. Ekon. dan Kewirausahaan*, vol. 6, no. 1, 2023, [Online]. Available: <https://share.google/3S9uatKQb5AhLMi3N>
- [11] F. D. Mujasmara, R. Tri, T. Panggabean, and R. S. Muliana, "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res. Vol.*, vol. 3, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APeran>
- [12] S. A. Ramdani, "Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari apbd terhadap kesenjangan pendapatan di indonesia 1," *J. Manaj. Perbendaharaan* —, vol. 5, pp. 57–77, 2024, [Online]. Available: <https://jmp.kemenkeu.go.id>
- [13] D. N. Sari, R. Jannah, Y. Rizal, and P. Andiny, "Analisis Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *J. Ris. Ekon. dan Akunt.*, vol. 2, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2689>
- [14] H. Riofita, "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech," *J. Ekon. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 137–151, 2024, [Online]. Available: <https://share.google/Psrw8Za8DexkdWhAq>
- [15] F. Naifa, N. Huda, and H. Riofita, "Peran Pendapatan Nasional dalam Menilai Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Ekonomi," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 9, no. 2021, pp. 16366–16368, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28293>
- [16] M. S. Harefa *et al.*, "Jurnal mudabbir," *J. MUDABBIR (Journal Res. Educ. Stud.*, vol. 5, pp. 3677–3683, 2025, [Online]. Available: <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN
- [17] S. Aslamiyah, "Bridging the gap : evaluating Indonesia ' s National income and societal welfare through an Islamic economic perspective," *J. Islam. Econ. Manag. Bus.*, vol. 6, no. 1, pp. 23–44, 2024, [10.21580/jiemb.2024.6.1.20358](https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.1.20358).
- [18] S. R. Shalehah, L. Fadliyanti, and A. Anggara, "INFRASTRUKTUR , KINERJA EKONOMI , DAN PELAYANAN SOSIAL DI Penelitian ini mengeksplorasi dinamika ketimpangan pendapatan di 30 provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 , dengan menggunakan data panel yang mencakup 300 observasi . Fokus penelitian," *J. Akunt. Dan Keuang. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 60–68, 2022, [Online]. Available: <https://share.google/6ufxTYxqwTueF8DnG>
- [19] E. Sinaga, M. Purba, W. R. Situmorang, and J. Situmorang, "Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Inflasi : Studi Kasus Indonesia pada Tahun 2022-2024," vol. 3, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i2.1703>